BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 ini mencapai angka 5,05 persen (*year on year*) berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).¹ Pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini yang tumbuh pesat, membuat meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang atau produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan di suatu pasar (*market*) yang semakin meningkat akan memberikan kesempatan kepada konsumen memilih suatu produk dari munculnya beragam variasi barang dan jasa yang bisa dikonsumsi.

Permintaan barang yang semakin banyak, produsen yang semakin banyak, berpotensi untuk memunculkan celah-celah bagi produsen tertentu yang memperjual-belikan barang dengan kualitas atau mutu yang tidak sesuai standart serta menimbulkan hal-hal yang berpotensi merugikan konsumen. Dalam hal ini konsumen ialah tiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen dan produsen (pelaku usaha) dalam interaksinya, Indonesia menciptakan aturan yang melindungi kepentingan konsumen berupa

¹ Kementerian Keuangan : '*Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2024, Menkeu: Pemerintah Akan Perhatikan Konsumsi, Investasi, Ekspor, Impor*', Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Online), 6 Agustus 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/jaga-pertumbuhan-ekonomi-2024>, diakses pada tanggal 3 November 2024

Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut terdiri dari 15 bab dan 65 pasal, yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di mana terdapat jaminan terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang ini berlaku setelah setahun sejak disahkan, tepatnya pada tanggal 20 Bulan April Tahun 2000.² Seluruh kepentingan konsumen dilindungi oleh undang-undang secara pasti.

Di tahap awal kebijakan pembangunan lima tahun menuju konsepsi pembangunan jangka panjang pertama, kehidupan ekonomi bisnis Indonesia diwarnai dengan berbagai perdebatan pro dan kontra, terkait fenomena pertumbuhan serta perkembangan dunia usaha, dan bagi sebagian masyarakat menilai indikator kemajuan sebuah negara umumnya dilihat dari tingkat perekonomiannya. Namun saat suatu negara memasuki tahap kesejahteraan, tuntutan oleh karena intervensi pemerintah dari pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah sangatlah kuat.³ Yang berarti masalah keberhasilan ekonomi suatu negara belum menjadi gambaran tolak ukur terciptanya keberhasilan negara dalam menjamin secara hukum kondisi kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Indonesia adalah negara agraris dengan prioritas utama dalam pembangunan di bidang pertanian. Hal ini di dukung penuh dengan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen yang strategis dalam

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet 3, Diadit Media, Jakarta, 2007, h. 46

³ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia, Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi, Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h. 44

pembangunan nasional. UU No.7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu negara dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Berbagai hal dilakukan dalam membangun sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian merupakan usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara menambah luasan area pertanian baru, misalnya dengan cara membuka hutan dan semak belukar, membuka lahan daerah di sekitar rawa-rawa, atau daerah pertanian baru yang belum dimanfaatkan.⁴ Sedangkan Intensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana mengolah lahan pertanian yang ada dengan sebaikbaiknya dengan cara mengendalikan kualitas pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan pemanenan.⁵

Dalam hal ini pupuk menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan komoditas pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pupuk merupakan bahan kimia dan/atau organik yang berperan dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman secara langsung atau tidak langsung. Beragamnya pilihan pupuk memberikan banyak pilihan pada konsumen

⁴ Hidayati, F., Yonariza, Y., Nofialdi, N., & Yuzaria, D. (2019). *Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan*. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, 2019, 1, 113–119. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a15> diakses pada 4 November 2024

⁵ Hanisah, M., & Juliana. *Pengaruh Mutu Intensifikasi Terhadap Produksi pada Usahatani Kelapa Sawit (Elaeis guenensis, Jacq) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur*. AGRISAMUDRA, 2015, h 41–50

untuk memilih jenis produk apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas tanaman.

Namun kebebasan tersebut sering tidak diikuti dengan kewaspadaan dan ketidakpedulian konsumen terhadap potensi tindakan pelaku usaha atau produsen yang dapat merugikan. Dikarenakan sedikitnya pengetahuan dari konsumen tentang produk pupuk yang digunakan, baik tentang bahan yang digunakan atau proses pembuatannya. Ketidakwaspadaan dan ketidakpedulian konsumen tersebut sering kali diperkeruh dengan minimnya kesadaran konsumen akan hak-hak dan kewajibannya, terutama dari segi hukum.⁶

Pelaku usaha, yang juga dikenal sebagai produsen, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil mungkin. Prinsip ini mendorong sebagian pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang bisa merugikan konsumen melalui produk yang mereka hasilkan dan pasarkan. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, baik dari aspek pendidikan, kondisi ekonomi, maupun kemampuan tawar-menawar.

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan hukum yang bertujuan melindungi konsumen, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun penerapan hukum secara konkret. Namun, tanggung jawab tersebut seringkali tidak dijalankan dengan optimal, misalnya dalam hal penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan atas ketentuan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, salah satu langkah yang diambil

⁶ Az. Nasution, *Op.cit*, h 16.

pemerintah adalah dengan menetapkan regulasi terkait standar mutu pada produk pupuk.⁷

Dengan pemenuhan standar, diharapkan dapat menghasilkan produk berkualitas, harga barang kompetitif, memenuhi standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) penggunaan barang bagi konsumen. Di era perdagangan bebas pengaturan yang terkait dengan peredaran barang atau jasa yang diberlakukan oleh negara harus mengacu dan memenuhi Standar Internasional (*International Organization for Standard/ISO*) dan Standar Nasional Indonesia atau yang disingkat (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standart Nasional) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jaminan mutu akan kualitas suatu barang dan/atau jasa, merupakan hak mutlak yang wajib diperoleh oleh setiap konsumen. Seperti yang tertuang pada Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 08 Tahun 1999, menyebutkan bahawasanya setiap “hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Kualitas pupuk yang baik dapat membantu meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya produksi, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Namun, kualitas pupuk yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan dampak negatif bagi konsumen itu sendiri, orang lain maupun terhadap lingkungan, kerugian mataerieel maupun non materieel.

⁷ Tambunan, Togap. *Kaji Ulang Peran Koperasi Dalam Menunjang Ketahanan Pangan*. (Infokop Nomor 28 Tahun XXII). 2006. h 9.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, cukup untuk memberikan cakupan ruang lingkup yang terbatas bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi atau kegiatan perdagangan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak secara keseluruhan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 dapat memberikan titik terang bagi konsumen untuk mendapatkan haknya, teruntuk pasal 4 huruf c, dimana dalam pasal tersebut belum dan/atau tidak memberikan suatu gambaran hukum yang pasti, menjadikannya kurang tegas dan kurang jelas, sehingga peluang dan potensi dalam kelalaian pelaku usaha dalam menjamin barang dan/atau jasanya tidak terlaksana dengan baik, bahkan lebih ekstrimnya melakukan pelanggaran hukum yang disengaja dengan berkelit dengan aturan-aturan yang masih kurang jelas.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Didalam konteks peredaran pupuk, pasal tersebut memiliki implikasi yang begitu penting.

Pasal tersebut dengan tegas melarang beredarnya pupuk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Membuat pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pupuk harus dapat memastikan pupuk yang beredar memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila tidak, pelaku usaha dianggap melanggar pasal ini.

Pelanggaran pada pasal ini memiliki konsekuensi serius yakni sanksi hukum dan kerugian materiil. Sehingga pelaku usaha harus sangat berhati-hati dalam

memproduksi dan mengedarkan pupuk serta memastikan bahwa pupuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Dalam implementasinya, pasal ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah harus dapat tegas dalam menetapkan standar mutu pupuk yang jelas dan akurat, melakukan pengawasan yang efektif guna memastikan pupuk yang beredar di pasar memenuhi telah standar mutu.

Dengan demikian, pasal 4 huruf c UUPK Tahun 1999 dapat dengan efektif melindungi konsumen dari pupuk-pupuk yang tidak standar, dapat memastikan pelaku usaha bisa memproduksi dan mengedarkan pupuk yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Beberapa kasus kualitas pupuk yang tidak sesuai dengan standar telah terjadi di Indonesia, seperti kasus pupuk npk phoska palsu di Magetan dan Tulungagung Jawa Timur pada tahun 2022. Para pelaku mendatangkan pupuk palsu dari Mojokerto pupuk tersebut kemudian dikemas ulang menyerupai pupuk asli jenis Phonskha polisi berhasil membongkar kasus berdasarkan aduan dari Masyarakat. Setelah dilakukan uji lab oleh UGM pada NPK palsu tersebut, kandungan N, P dan K nya di bawah 1 persen. Padahal pelaku menuliskan kandungan NPK mencapai 15 persen.⁸

⁸ Tety Polmasari, 'Pupuk Ber-SNI versus Pupuk Palsu dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Global', Pos sore (online), 16 September 2022, h 1 <<https://posore.id/pupuk-ber-sni-versus-pupuk-palsu-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-global/>>. Diakses pada 12 November 2024

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian kualitas pupuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen atas kualitas pupuk yang tidak sesuai dengan standar di Indonesia dan mengidentifikasi dampaknya terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut penelitian ini dengan judul: *Permemberlakuan Standar Mutu Pupuk Dalam Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemberlakuan standar mutu pupuk sudah memenuhi klausul jaminan produk dalam pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha apabila mengedarkan pupuk yang tidak sesuai standar mutu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah pemberlakuan standar mutu pupuk sudah memenuhi klausul jaminan produk dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

2. Mengidentifikasi pertanggung jawaban dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang mengedarkan pupuk yang tidak sesuai standar mutu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sarana pembelajaran bagi masyarakat, khususnya petani mengenai adanya perlindungan bagi konsumen.
2. Sarana penulisan yang lebih luas untuk menggali dan mengetahui dampak adanya peredaran pupuk yang tidak sesuai standar.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada karya ilmiah ini, bagian tinjauan pustaka memuat beragam informasi yang bersumber dari pandangan para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum, serta sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam menganalisis dan menjawab berbagai pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan Konseptual merupakan kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis fenomena atau masalah penelitian.

1.5.1.1 Esensi Perlindungan Konsumen

Konsumen dapat diartikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya,

dengan tujuan bukan untuk diperjualbelikan. Pemahaman mengenai konsumen ini umumnya dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum yaitu pengguna, pemakai barang atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara merupakan pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa sebagai bahan atau sarana dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa lain yang nantinya akan diperdagangkan dengan tujuan komersial. Dalam konteks ini, konsumen jenis ini dikategorikan sebagai pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir adalah pengguna, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁹

Menurut Inosentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir sebuah produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah atau undangan.¹⁰

Menurut Muhammad dan Alimin, konsep konsumen dalam Islam didasarkan pada pandangan mengenai harta, hak, dan kepemilikan, baik yang diperoleh melalui transaksi maupun tanpa transaksi, yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam ajaran Islam. Konsumen diartikan sebagai individu, kelompok, atau badan hukum yang menggunakan suatu harta atau jasa

⁹ Az Nasution, *Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998, h 3-4.

¹⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 16

berdasarkan hak yang sah, baik untuk digunakan langsung sebagai pemakai akhir maupun sebagai bagian dari proses produksi berikutnya.¹¹

Perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui peraturan perundang-undangan khusus. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan konsumen.¹²

Adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sekaligus mendorong transparansi informasi terkait barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini juga berkontribusi dalam membentuk sikap jujur dan rasa tanggung jawab di kalangan pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat karena mampu memberikan jaminan kepastian hukum, terutama dalam melindungi konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran hak-haknya oleh pelaku usaha.

¹¹ *Ibid*, h 17

¹² Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, h 4

Perlindungan hukum pada konsumen adalah suatu hal yang sangat bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat karena hal tersebut hal tersebut menjamin kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan membuktikan bahwa hukum dapat melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen.¹³

Perlindungan konsumen memberikan jaminan kepastian hukum atas pemenuhan berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari masa kelahiran hingga akhir hayat, termasuk seluruh kebutuhan lainnya. Meskipun istilah ini sering dikaitkan dengan hukum konsumen, keduanya pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang serupa. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan kumpulan asas dan norma yang mengatur hubungan antara pihak penyedia dan pengguna barang atau jasa, khususnya dalam konteks penyediaan dan pemanfaatan produk di tengah masyarakat.¹⁴

Terkait perlindungan konsumen, Yusuf Shofie menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia membagi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen ke dalam dua kategori utama, yaitu:¹⁵

- a. Perbuatan yang dilarang untuk Pelaku usaha,
- b. Ketentuan tentang klausul buku.

¹³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h. 6-9

¹⁴ Az. Nasution, *Op.cit*, h 16.

¹⁵ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Edisi Cet 3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 57.

Pengelompokan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas segala potensi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku usaha. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang utama, yang mencerminkan ruang lingkup intervensi hukum dan kebijakan publik, yaitu:¹⁶

- a. Perlindungan terhadap keselamatan fisik,
- b. Penguatan dan perlindungan atas kepentingan ekonomi konsumen,
- c. Penetapan standar keamanan serta mutu barang dan jasa,
- d. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok masyarakat,
- e. Upaya-upaya untuk berpotensi konsumen untuk melakukan tuntutan ganti kerugian,
- f. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi,
- g. Pengaturan sektor-sektor tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan, seperti pangan, minuman, obat-obatan, serta produk kosmetik.

1.5.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup hal-hal berikut :

- a. Hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, serta perlindungan dari risiko saat menggunakan barang dan/atau jasa,,

¹⁶ *Ibid*, h. 58.

- b. Hak dalam menentukan pilihan terhadap barang atau jasa, serta memperoleh produk tersebut sesuai dengan nilai, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan,
- c. Hak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang atau jasa,
- d. Hak menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan,
- e. Hak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan advokasi, dan penyelesaian sengketa secara layak dalam hal terjadi pelanggaran hak sebagai konsumen,
- f. Hak untuk menerima pembinaan dan edukasi sebagai konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara adil, jujur, serta tanpa diskriminasi,
- h. Hak atas kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya,
- i. Hak-hak lainnya yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memiliki sejumlah hak, konsumen juga dibebani kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Wajib membaca dan memahami petunjuk penggunaan serta prosedur pemanfaatan barang dan/atau jasa guna menjamin

keselamatan dan keamanan,

- b. Bertindak dengan itikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa,
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam transaksi,
- d. Patuh terhadap proses penyelesaian sengketa hukum terkait perlindungan konsumen.

1.5.1.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan penyelenggaraan perlindungan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

a. Asas manfaat

Asas ini menekankan bahwasanya seluruh upaya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus diarahkan untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen.

b. Asas Keadilan

Asas ini mempunyai tujuan untuk mendorong partisipasi berbagai lapisan masyarakat secara optimal dan menjamin hak konsumen agar memperoleh perlakuan yang adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki adanya keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dari sisi materi maupun nonmateri (spiritual).

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan guna menjamin bahwa setiap konsumen merasa aman dan terlindungi ketika menggunakan, mengonsumsi, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini menjamin bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kedudukan yang setara di mata hukum, serta memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses perlindungan konsumen.

1.5.1.4 Esensi Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 huruf c angka 3, pelaku usaha didefinisikan sebagai individu maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui suatu bentuk perjanjian dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.

Dalam kerangka perlindungan konsumen, pelaku usaha mencakup tidak hanya produsen dan penyedia jasa, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, secara luas pelaku usaha dapat dipahami sebagai entitas yang berperan dalam proses produksi, pengolahan, dan penyampaian barang atau jasa kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.¹⁷

1.5.1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha tertuang dalam pasal 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak-hak pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 13

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dijelaskan pada Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan Usahannya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan,

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha wajib menjalankan usahanya dengan itikad baik, sementara konsumen juga dituntut untuk bersikap jujur dan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik mencerminkan sikap yang sesuai dengan norma hukum, nilai-nilai keagamaan, etika, serta tata krama. Itikad baik juga mencerminkan dimensi moral yang melekat dalam diri manusia, yang selaras dengan nilai-nilai luhur sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab."¹⁹

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang bagaimana sebaiknya pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain”.

¹⁸ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam Publisher, 2018, h.110

¹⁹ Abdul Halim Baraktullah, *Op.cit*, h. 39-40

- b. Pasal 14 mengatur ketentuan bagi pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa untuk tujuan perdagangan dengan menyertakan pemberian hadiah melalui mekanisme undian. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang untuk menunda atau tidak melaksanakan penarikan hadiah setelah tenggat waktu yang telah dijanjikan, mengumumkan hasil undian bukan melalui media massa, memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan, serta mengganti hadiah dengan barang lain yang tidak memiliki nilai yang setara dengan hadiah yang dijanjikan sebelumnya.
- c. Pasal 15 Melarang Pelaku Usaha dalam melakukan penawaran produk atau jasa dengan cara memaksa atau menggunakan metode lain yang dapat menyebabkan gangguan secara fisik maupun psikologis kepada konsumen..
- d. Pasal 16 Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
 - 1. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
 - 2. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan atau prestasi.
- e. Pasal 17 Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - 1. Menyesatkan konsumen terkait mutu, jumlah, bahan, manfaat, harga, atau waktu penerimaan produk atau jasa.
 - 2. Menyalahgunakan jaminan atau garansi atas produk atau jasa yang ditawarkan.

3. Memuat informasi yang salah, menyesatkan atau tidak akurat mengenai barang atau jasa.
4. Tidak mencantumkan informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa.
5. Mengeksploitasi peristiwa atau individu tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan, menyusun kebijakan, atau melakukan tindakan hukum. Dalam penelitian landasan yuridis yang digunakan sebagai berikut.

1.5.2.1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan jujur, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4. Berdasarkan ketentuan ini, setiap konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang akan digunakan. Dalam hal ini, pupuk yang dikategorikan sebagai barang konsumsi juga termasuk dalam cakupan tersebut. Oleh karena itu, konsumen pupuk berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapya mengenai produk pupuk sebelum memutuskan untuk

menggunakannya.

- a. Pasal 8 ayat (1) huruf g, Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- b. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan label atau keterangan pada produk yang memuat informasi penting, seperti nama barang, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal produksi, efek samping, identitas serta alamat pelaku usaha, dan informasi lain yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pasal 8 ayat (1) huruf j, Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Informasi barang dan/atau jasa untuk konsumen harus dilaksanakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen.

1.5.2.2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 106/M-IND/PER/11/2015

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

106/M-IND/PER/11/2015 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 yang mengatur penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Pupuk Anorganik Tunggal. Perubahan ini bertujuan untuk menjamin aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan pupuk tersebut. Selain itu, regulasi ini memberikan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi, serta mendorong daya saing industri melalui upaya penyederhanaan aturan dan pengurangan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam ketentuan penerapan SNI wajib untuk Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan sebelumnya.²⁰

1.5.2.3 Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengatur dan menekankan bahwa penyediaan pupuk harus memenuhi standar mutu serta terjamin keefektifan dalam menjamin kualitas dan efisiensinya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah. Persyaratan pendaftaran pupuk yang harus dipenuhi jika dilihat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

²⁰ Imanuel Berin et al., *Pra Desain Pabrik Triple Superphosphate (TSP) dari Batuan Fosfat*, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 2020, h. 1

Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenh Tanah adalah memiliki:

- a. Rincian konsep label,
- b. bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang,
- c. Laporan Uji Efektifitas,
- d. Rincian deskripsi pupuk,
- e. Hasil uji mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pupuk wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
- f. penunjukan pemilik formulasi di luar negeri bagi formula dari luar negeri.

1.5.2.4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman

Peraturan ini dibuat sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mengatur beberapa hal, di antaranya:

- a. Pupuk merupakan sarana produksi yang penting untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman.
- b. Pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektivitasnya.
- c. Pupuk an-organik rusak adalah pupuk yang mengalami perubahan fisik dan/atau kimia, sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk budidaya tanaman.

- d. Produksi pupuk an-organik harus mengutamakan kebutuhan di dalam negeri.
- e. Pengadaan pupuk an-organik impor dilakukan untuk pupuk yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori adalah kerangka konseptual yang menjelaskan dan memprediksi fenomena atau gejala tertentu dengan menggunakan teori-teori.

1.5.3.1 Teori Pertanggung Jawababan

Secara etimologis, istilah "tanggung jawab" terdiri dari dua kata yakni "tanggung" yang berarti memikul atau menanggung sesuatu, dan "jawab" yang berarti memberikan penjelasan atau membalas. Tanggung jawab dimaknai sebagai kesanggupan memikul beban atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, baik secara pribadi maupun secara hukum. Dalam kehidupan sosial dan dalam sistem hukum, tanggung jawab memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar bagi seseorang untuk dipertanyakan atau dimintai kejelasan atas perbuatannya, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian. Tanggung jawab bukan hanya soal kesediaan moral, tetapi juga berkaitan erat dengan konsekuensi yuridis yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif hukum, tanggung jawab memiliki makna yang lebih spesifik. Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum, menjelaskan bahwa: "Tanggung jawab adalah suatu keadaan di mana

seseorang menanggung akibat dari perbuatannya yang dilakukan dengan sadar atau tidak sadar, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara hukum.”²¹ Seseorang tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari akibat hukum yang timbul dari tindakannya. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap hukum, baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum, wanprestasi, maupun pelanggaran administratif.

Di dalam sistem hukum perdata, tanggung jawab sering kali muncul dalam bentuk *liability*, yaitu kewajiban untuk mengganti suatu kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan atau karena tidak melaksanakan suatu perjanjian. Dalam *Black's Law Dictionary*, *liability* diartikan sebagai: “*Legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment*”²² Tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada relasi antara pelaku dengan korban, tetapi juga dapat berlaku terhadap masyarakat secara umum, khususnya apabila perbuatan tersebut melanggar kepentingan publik.

Tanggung jawab juga memiliki dimensi etika dan moral, di mana seseorang atau badan usaha dianggap bertanggung jawab jika ia memiliki kesadaran dan niat baik (*good faith*) untuk menanggung akibat dari tindakannya. Namun dalam hukum, tanggung jawab tidak selalu

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 20.

²²Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed, MN: West Publishing Co., St. Paul, 2009, h. 997.

bergantung pada niat (*mens rea*), tetapi juga pada akibat (*actus reus*) yang timbul dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seseorang atau pelaku usaha dapat saja dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak memiliki niat buruk, jika akibat perbuatannya menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, tanggung jawab dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Melalui tanggung jawab, hukum memberikan mekanisme agar setiap subjek hukum dapat dimintai kejelasan atas dampak perbuatannya, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

1.5.3.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi atau upaya dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak dan kepentingan warga negara. Konsep ini merupakan perwujudan dari fungsi hukum dalam memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Berbagai pakar hukum memiliki definisi yang berbeda mengenai makna dan cakupan perlindungan hukum. Berikut ini beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli:²³

a. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan dari harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

²³ Tim Hukumonline, 'Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', Hukum Online.Com (Online), 30 September 2022, h 1-2, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>>

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dan mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Kemudian, perlindungan represif yaitu perlindungan yang diberikan setelah timbulnya sengketa, untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Secara umum, perlindungan hukum adalah jaminan dari negara agar setiap individu bisa menggunakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.

b. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo merumuskan perlindungan hukum sebagai bentuk penjagaan terhadap kepentingan seseorang, dengan memberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak demi melindungi kepentingan tersebut. Pemikiran ini dipengaruhi oleh pandangan Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yakni untuk menyalurkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui perlindungan dan pembatasan tertentu.

c. Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soekanto menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk jaminan yang

diberikan kepada subjek hukum melalui sistem dan perangkat hukum. Ia juga menyebutkan lima faktor utama yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dan efektivitas penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor undang-undang, yakni Peraturan perundang-undangan, sebagai norma tertulis yang dibuat oleh otoritas resmi.
2. Faktor penegak hukum, adalah Penegak hukum, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas adalah Sarana dan prasarana, seperti kualitas SDM dan peralatan pendukung.
4. Faktor masyarakat, yakni sebagai lingkungan sosial tempat hukum diberlakukan dan ditaat.
5. Faktor kebudayaan, yakni yang mencakup hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan bersama..

d. Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi.

e. Teori perlindungan hukum menurut Setiono

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan langkah atau tindakan yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari

tindakan otoriter pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara bermartabat sebagai manusia.

1.5.3.3 Teori Standart Mutu Produk

Suatu perusahaan seringkali dihadapi pada situasi menentukan pilihan untuk pemasok untuk kebutuhan produksi. Secara logis, perusahaan dengan jaminan mutu kualitas produk yang dihasilkan akan memiliki keunggulan untuk dipilih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki standar manajemen mutu

Pengertian Mutu Secara umum, definisi mutu menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Philip B. Crosby Crosby berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan, seperti jam tahan air, sepatu yang tahan lama atau dokter yang ahli. Ia juga mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang pada proses dalam organisasi.
- b. W. Edwards Deming Deming berpendapat bahwa mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus.
- c. Joseph M. Juran Juran berpendapat bahwa mutu berarti kesesuaian dengan penggunaan, seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga atau sepatu kulit yang dirancang untuk ke kantor. Pendekatan Juran adalah orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan.

d. K. Ishikawa Ishikawa berpendapat bahwa mutu berarti kepuasan pelanggan. Dengan demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa mutu adalah tingkatan karakteristik yang melekat pada sebuah produk yang mencukupi persyaratan/keinginan. Maksud dari tingkatan berarti selalu ada peningkatan setiap saat. Sementara itu, karakteristik adalah berbagai fitur yang secara alami merupakan bagian dari suatu produk. Ini mencakup hal-hal yang dapat Anda lihat, sentuh, atau rasakan melalui indra Anda, serta bagaimana produk tersebut bertindak atau berperilaku.²⁴

Mutu produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam menjalankan fungsinya, meliputi daya tahan, kehandalan, keakuratan, kemudahan operasi dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Jika pelanggan merasa puas, maka konsumen akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali membeli.²⁵

Makna mutu produk erat kaitannya dengan tingkat kesempurnaan, kesesuaian dengan kebutuhan, bebas dari cacat, bebas dari ketidak sempurnaan, atau bebas dari kontaminasi serta kemampuan dalam memuaskan konsumen. Konsumen adalah pihak yang paling tepat dan adil dalam menilai masalah mutu dari produk yang disediakan.

²⁴ Rudi Suardi, *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 Penerapannya Untuk Mencapai TQM*, PPM, Jakarta, 2004, h. 3

²⁵ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip - prinsip Pemasaran Edisi 12*, Erlangga, Jakarta, 2008, h. 347

Sebuah produk yang memiliki fitur atau manfaat yang memuaskan kebutuhan konsumen dapat disebut sebagai produk atau layanan yang bermutu, demikian pula sebaliknya produk atau layanan yang memiliki fitur atau manfaat yang tidak memuaskan kebutuhan konsumen dapat disebut sebagai produk yang tidak bermutu.²⁶ Jadi, mutu produk merupakan kemampuan sebuah produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan.

1.5.3.4 Teori Perdagangan Berisi Informasi Pada Konsumen

enyampaian informasi yang akurat, transparan, dan jujur dalam proses transaksi merupakan kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini berkaitan erat dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang memadai. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, menegaskan bahwa setiap konsumen berhak menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Sementara itu, Pasal 7 dari undang-undang yang sama menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan informasi tersebut secara lengkap, termasuk mengenai perawatan, perbaikan, serta garansi barang atau jasa yang mereka tawarkan. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha untuk menjual produk atau jasa yang tidak sesuai dengan klaim atau janji yang tertera dalam iklan.

²⁶ Rudy Prihantoro, *Konsep Pengendalian Mutu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, h.

Europe Economische Gemeenschap (EEG) menyepakati lima hak dasar konsumen, antara lain:²⁷

1. Hak atas perlindungan Kesehatan dan keamanan,
2. Hak atas perlindungan kepentingan ekonomi,
3. Hak atas mendapatkan ganti rugi,
4. Hak atas penerangan,
5. Hak untuk di dengar.

Sebagai salah satu dari hak pokok yang di akui dalam *Guidelines PBB* maupun *EEG* tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menekankan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, yang diatur dalam Pasal 7 huruf b, Undang Undang Perlindungan Konsumen. Realitanya konsumen belum mengetahui bahan dasar suatu produk, bagaimana proses pendistribusiannya, strategi pasar apa yang digunakan dalam pendistribusian, dan sebagainya. Oleh karena itu, informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha memegang peranan yang sangat penting sebelum ia menggunakan sumber dananya untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan atau jasa tersebut.²⁸

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Hukum Bisnis*, Majalah Warta Ekonomi, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2005, h 62

²⁸ *Ibid.* h 61.

Hak atas informasi sebagai bagian dari perlindungan konsumen bertujuan untuk mewujudkan sistem perlindungan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan kemudahan akses informasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika informasi yang disampaikan tidak akurat atau menyesatkan, maka konsumen kehilangan kemampuan dasar untuk memilih secara sadar dan bijak. Akibatnya, konsumen tidak dapat memastikan apakah produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya atau tidak.

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Novita Wulandari. Dengan judul skripsinya: *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”* Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro 2023. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Upaya perlindungan konsumen menjelaskan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa namun konsumen menyatakan pelaku usaha - tidak memberikn informasi terkait produk makanan dan minuman saat bertransaksi. Pada penelitian tersebut

pelaku usaha mau mengganti rugi apabila menyebabkan konsumen mengalami kerugian.²⁹

2. Audyanza Manaf. Dengan judul skripsinya: “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan konsumen melalui jalur diluar pengadilan yakni menyelesaikan sengketa secara langsung, kedua konsumen dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan. Konsumen memiliki pilihan dengan melalui mekanisme perdata atau pidana. Mekanisme pidana dapat digunakan sebagai *premium remedium* untuk memaksa pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan UUPK. untuk memberikan *shock therapy* agar pelaku usaha yang lainnya dapat melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku.³⁰

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang upaya-upaya perlindungan untuk konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pengulasan materi tentang dampak kepastian hukum yang harus diterima pelaku usaha dalam melakukan

²⁹Novita Wulandari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.

³⁰ Audyanza Manaf, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

kewajibannya dan memfokuskan analisis yuridis perlindungan konsumen sebagai jaminan hukum di Indonesia

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang sesuai dan akurat dari permasalahan yang telah dirumuskan.

1.7.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³¹ Hasil dari penelitian hukum normatif didapatkan penjelasan dari rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini hanya meneliti norma hukum tanpa melihat praktek hukumnya dilapangan (*law in action*).

1.7.2 Metode Pendekatan

³¹ Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan yang dipakai untuk mengumpulkan data berupa bahan-bahan hukum dari berbagai aspek dalam mencari jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menelaah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti,³² yaitu analisis perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat sarjana hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah hukum.³³

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah metode analisis yang berfokus pada kasus yang spesifik dan relevan terhadap peraturan perundang-undangan. Kasus yang dipilih dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan konsep yang relevan dengan peraturan perundang-undangan. Analisisnya dapat membantu memahami bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan pada prakteknya, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam peraturan tersebut. Sehingga pendekatan kasus dapat

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian HUKUM*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 136

³³ *Ibid*, h. 177

membantu meningkatkan pemahaman dan penafsiran peraturan perundang-undangan.³⁴

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen beserta penjelasannya,
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional,
- e. Keputusan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 300.

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, artikel-artikel dari majalah maupun internet, karya ilmiah hukum, serta bahan bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pada teknik ini berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang sedang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder dikumpulkan lalu menelaah bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran permasalahan secara jelas. Dikatakan kualitatif karena hanya berlaku untuk permasalahan yang sedang diteliti.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diolah, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang memberikan gambaran berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian kemudian dianalisa dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Selanjutnya digunakan metode deduktif dengan menempatkan bahan hukum sebagai hal

yang umum terhadap topik permasalahan yang sedang diteliti sebagai hal yang khusus, guna mendapatkan kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) Bab sebagaimana akan diuraikan berikut.

Bab 1 menerangkan Pendahuluan mengenai apa yang menjadi latar belakang penulis memilih topik ini sebagai topik skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri jenis penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab 2 berisi pembahasan mengenai pemberlakuan standar mutu pupuk memenuhi sebagian klausul jaminan produk, keterbatasan pemberlakuan standar mutu pupuk dalam memenuhi klausul jaminan produk, rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pemberlakuan standar mutu pupuk

Bab 3 berisi pembahasan mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha apabila mengedarkan pupuk yang tidak sesuai standar mutu, dengan menitik beratkan sanksi dan konsekuensi pelaku usaha, landasan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha

Bab 4 adalah Penutup yang akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta menjawab permasalahan di dalam skripsi ini.